

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Akhir-akhir ini lambatnya belanja APBD menjadi isu permasalahan penting bagi pemerintah daerah. Belanja APBD menjadi topik pembahasan kementerian keuangan karena fungsi pentingnya dalam penanganan daerah otonom. Terutama di masa pandemi covid-19 ini yang sangat diperlukan demi percepatan pemulihan di setiap daerah. Hal ini tercermin dari salah satu penyerapan jenis belanja, yaitu belanja perlindungan sosial daerah. Yang baru mencapai Rp 5,86 triliun pada bulan Agustus 2021. Ini menunjukkan turunnya 27,4 persen dibandingkan Agustus tahun lalu karena telah mampu mengalokasikan Rp 8,07 triliun.

Menteri Keuangan selaku bendahara negara menjelaskan bila suatu daerah langsung membelanjakan dana transfer dari pemerintah pusat, maka dampaknya akan langsung dirasakan masyarakat. Namun masih ada saja daerah yang tidak langsung menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat (liputan6.com:2021). Jadi, pada saat transfer sudah dimintakan untuk tata kelola dengan persyaratan salur. Tetapi, pemerintah daerah pun tidak membelanjakannya. Hal tersebut tentu akan berdampak pada proses penyaluran dana berikutnya yang lebih sulit karena tidak lengkapnya persyaratan seperti laporan penggunaan dana.

Pemerintah daerah harus berupaya dalam pelaksanaan APBD berjalan dengan efektif dan efisien. Dalam penyelenggaraannya, pemerintah daerah dibantu oleh sekretariat daerah yang dipimpin oleh sekretaris daerah. Sekretaris daerah bertugas membantu kepala daerah dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif.

Sistem informasi akuntansi memiliki peranan penting dalam mendukung jalannya proses pemerintahan. Menurut Romney dan Steinbart (2018) sistem informasi akuntansi adalah suatu sistem yang mengumpulkan, mencatat, menyimpan, dan memproses data untuk menghasilkan informasi bagi pengambil keputusan. Yang termasuk orang, prosedur dan instruksi, data, perangkat lunak, infrastruktur teknologi informasi, dan pengendalian internal dan langkah-langkah keamanan. Sedangkan siklus pengeluaran adalah serangkaian aktivitas bisnis yang berulang dan operasi pemrosesan data terkait yang terkait dengan pembelian dan pembayaran barang/jasa. Sekretariat daerah memerlukan sistem informasi akuntansi dengan perencanaan dan diawasi dengan benar, demi mengontrol mekanisme keuangan yang masuk maupun keluar. Keberadaan sistem informasi akuntansi akan menunjang keberhasilan tujuan pemerintah daerah, khususnya dalam pengoptimalan belanja APBD.

Tidak hanya itu saja, fungsi pengendalian internal juga diperlukan dalam siklus pengeluaran pemerintah daerah. Menurut Mulyadi (2016), sistem pengendalian internal yang meliputi struktur organisasi, metode dan tingkatan ukuran yang dikoordinasikan digunakan untuk menjaga aset organisasi, mengecek

ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Soemarso (2004) juga menyebutkan bahwa pada dasarnya agar bisa memunculkan sistem pengendalian yang baik, dalam prosedur pengeluaran kas harus memperhatikan jumlah besar pengeluaran dilakukan melalui bank. Untuk pengeluaran dengan jumlah kecil dilakukan melalui dana kas kecil, semua pengeluaran kas harus memperoleh persetujuan dari yang berwenang, dan ada pemisahan tugas antara penyetuju pengeluaran kas, penyimpanan uang kas, dan yang melakukan pengeluaran serta yang mencatat. Penerapan pengendalian internal perlu diterapkan secara maksimal. Pengendalian intern yang lemah menyebabkan sulitnya mendeteksi kecurangan/ketidakkuratan proses akuntansi sehingga bukti audit yang diperoleh dari data akuntansi menjadi tidak kompeten (Winidyaningrum & Rahmawati, 2009).

Sistem pengelolaan keuangan di APBD belum tentu berjalan sesuai dengan rencana, seiring dengan terjadinya penyalahgunaan keuangan daerah. Kejadian yang sering terjadi ialah realisasi belanja daerah yang banyak di ecer-ecer dan dikebut di akhir tahun. Belanja yang tertumpuk di akhir tahun menyebabkan terjadinya penumpukan dana di daerah. Hal tersebut menandakan bahwa masih belum terfokus dan efisiennya penyerapan belanja daerah. Karena terlambatnya penetapan peraturan daerah tentang APBD, juga menyebabkan pelaksanaan program kegiatan terhambat. Pemerintah mulai menerapkan sanksi atas keterlambatan penetapan APBD. Sanksi tersebut berupa penundaan pencairan gaji pokok dan tunjangan kepala daerah dan anggota DPRD (kppod.org). Menurut direktur eksekutif KPPOD sanksi tersebut lebih manjur dibandingkan

dengan sanksi sebelumnya karena sudah terkait pendapatan mereka. Yang sebelumnya ditahan atau dipotongnya DAK dan DAU malah rakyat yang merasakannya.

Dalam pengadaan barang/jasa pemerintah permasalahan yang terjadi di lapangan yaitu kegiatan yang mengalami gagal lelang, adanya pemotongan anggaran, dan status lahan yang belum dibebaskan ([bpkp.go.id](http://bpkp.go.id)). Terjadinya gagal lelang juga menjadi kendala umum yang dihadapi pemerintah daerah. Hal tersebut membuat proses lelang harus diulang kembali yang pada akhirnya menghambat penyerapan anggaran dan pencapaian output

Melalui pengawasan keuangan daerah terkait proses kegiatan, ditujukan untuk memperoleh jaminan agar pengelolaan keuangan dapat sejalan dengan rencana dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pengarahan, pengawasan dan mengukur sumber daya, dalam fungsi pencegahan, dan pendeteksian *fraud* serta melindungi sumber daya organisasi. Terkait seluruh hak dan kewajiban perangkat daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.

Berdasarkan uraian diatas, penulis menyadari pentingnya sistem informasi akuntansi siklus pengeluaran. Hal tersebut, mendorong penulis untuk meninjau kesesuaian antara pelaksanaan aktivitas siklus pengeluaran dengan teori-teori yang telah dipelajari pada salah satu unit pemerintah daerah yaitu Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo. Penulis berniat untuk membuat karya tulis tugas akhir yang berjudul “TINJAUAN ATAS SISTEM INFORMASI AKUNTANSI SIKLUS PENGELUARAN PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO” yang mana akan meninjau mengenai fungsi pada siklus

pengeluaran, prosedur siklus pengeluaran, dokumentasi, dan pengendalian internal dalam siklus pengeluaran.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Rumusan masalah terkait penulisan karya tulis ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan sistem informasi akuntansi siklus pengeluaran pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo?
2. Apa saja dokumen yang digunakan dalam siklus pengeluaran pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo?
3. Bagaimana penerapan fungsi pengendalian terkait siklus pengeluaran pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penulis terkait penulisan karya tulis ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk meninjau pelaksanaan sistem informasi akuntansi siklus pengeluaran pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo.
2. Untuk mengetahui dokumen yang digunakan dalam siklus pengeluaran pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo dan membandingkan dengan teori yang telah dipelajari.
3. Untuk mengetahui penerapan fungsi pengendalian terkait siklus pengeluaran pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo.

## **1.4 Ruang Lingkup Penulisan**

Dalam sistem informasi akuntansi terkait siklus pengeluaran memiliki cakupan yang cukup luas. Maka dari itu, penulis akan membatasi ruang lingkup

yang diperlukan agar pembahasan dalam dalam karya tulis ini menjadi lebih terfokus. Objek atas tinjauan yang dituju meliputi aktivitas dari prosedur pemesanan sampai pembayaran tunai, dokumen yang digunakan, pihak yang terlibat, dan pengendalian internal atas siklus pengeluaran pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo.

### **1.5 Manfaat Penulisan**

Manfaat yang diharapkan penulis dalam penyusunan karya tulis ini, yaitu:

#### 1. Bagi Penulis

Dapat memperdalam wawasan penulis mengenai sistem informasi akuntansi pada siklus pengeluaran dan mengetahui praktiknya secara nyata pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo.

#### 2. Bagi Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo

Dapat memberikan bahan masukan terkait siklus pengeluaran Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo sehingga penerapan siklus pengeluaran menjadi lebih efektif dan efisien kedepannya.

#### 3. Bagi Akademik

Dapat memberikan kontribusi dan pemahaman ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang sistem informasi akuntansi siklus pengeluaran, sehingga dapat dijadikan bahan acuan referensi bagi penelitian selanjutnya.

### **1.6 Sistematika Penulisan**

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi gambaran umum karya tulis yang akan disusun oleh penulis atas beberapa bagian. Bagian tersebut meliputi latar belakang, rumusan masalah,

tujuan penulisan, ruang lingkup, manfaat penulisan, metode pengumpulan data, dan sistematika penulisan.

## BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi penjelasan mengenai teori-teori yang berkaitan dengan sistem informasi akuntansi terkait siklus pengeluaran yang menjadi topik pembahasan. Landasan teori yang dipaparkan oleh penulis antara lain pengertian sistem informasi akuntansi, aktivitas-aktivitas dalam siklus pengeluaran, dan proses pengendalian internal

## BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab ini memaparkan dan menjelaskan data-data dari objek karya tulis, yaitu Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo. Meliputi gambaran umum organisasi; aktivitas siklus pengeluaran Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo yang mencakup dokumen terkait, pihak yang terlibat, dan alur proses bisnis siklus pengeluaran, serta ancaman dan pengendalian siklus pengeluaran. Berdasarkan data yang ada, penulis menjelaskan melalui perbandingan antara teori dengan penerapan nyata siklus pengeluaran di Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo. Selain itu, penulis juga akan membandingkan ancaman dan pengendalian antara teori dan praktik nyata

## BAB IV SIMPULAN

Bab ini merupakan bagian penutup Karya Tulis Tugas Akhir. Bab ini berisi simpulan yang diperoleh atas tinjauan yang diuraikan pada bab-bab sebelumnya yang terkait dengan penerapan siklus pengeluaran serta sistem pengendalian internal yang telah diterapkan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo.